

ANALISIS YURIDIS DAMPAK INFLASI TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

PRAMUDHYA AFTON¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb180710001@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The impact of inflation is often used as an indicator of differences of opinion regarding human resources and sources of employment, between groups of workers, and between regions. This study aims to provide a juridical analysis of the effect of inflation on labor, unemployment, and the poor on inflation and employment inequality. This study uses research data based on labor law and data analysis is carried out with this juridical framework based on law number 13 of 2003 and article 7 of law number 23 of 1999 showing the impact of inflation on human resources and sources of labor, unemployment and the poor affect development inequality in cities affected by inflation.

Keywords: *The impact of inflation on employment, human resources, sources of labor, unemployment, the poor.*

1.PENDAHULUAN

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga-harga barang secara umum dan terus menerus. Inflasi disebabkan oleh banyak faktor. setidaknya ada enam faktor penyebab inflasi, di antaranya tingginya permintaan suatu barang atau jasa yang menyebabkan harga barang atau jasa tersebut naik. Pengertian, Jenis, Manfaat, Risiko, dan Cara Membeli Penyebab inflasi lainnya adalah kenaikan biaya produksi, peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan pada sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 tahun 2009, Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan krisis moneter secara berkelanjutan, pengalihan konsisten, dan transparansi ekonomi, harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian, dengan sasaran akhir laju inflasi.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Penyebab inflasi adalah perilaku masyarakat yang sering memprediksi atau sering disebut pra-inflasi, dan akhirnya menimbulkan inflasi akibat gangguan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat krisis kerusuhan tahun 1998. Seperti yang dijelaskan dalam UU PERDA No.3 tentang penanggulangan kemiskinan Masyarakat sedang mengalami kemunduran, terutama kalangan menengah ke bawah penghasilan semua orang. dampak inflasi yang tinggi akan mengakibatkan pendapatan riil masyarakat terus turun, yang pada akhirnya akan menurunkan taraf hidup masyarakat dan pada akhirnya membuat setiap orang semakin miskin.

Tingkat pendidikan yang rendah dan kekurangan tenaga kerja terampil merupakan faktor penyebab pengangguran lebih lanjut. Pengangguran yang tinggi adalah efek lain dari persaingan yang lebih intens. Ketidakcocokan antara penawaran dan permintaan adalah penyebab utama pengangguran (Latifah, 2017). Membagi pengangguran menjadi empat kategori: pengangguran siklis, pengangguran teknis, pengangguran struktural, dan bisa sebabkan pengangguran friksional.

Seseorang yang menganggur adalah orang yang tidak pernah bekerja atau orang yang sudah tidak bekerja dalam waktu tertentu (Kasnelly, 2020). Pengangguran mempengaruhi mereka

yang sedang mencari pekerjaan maupun mereka yang belum bekerja (Novalia, 2018). Karena mereka dipekerjakan oleh suatu perusahaan tetapi tidak menyelesaikan pekerjaannya (Adriyanto, Prasetyo, & Khodijah, 2020).

Banyak masalah sosial yang ada di komunitas kami, dan kali ini kami akan fokus pada pengangguran. Di Indonesia, pengangguran telah berkembang menjadi masalah ekonomi yang serius. Tingkat kemiskinan Indonesia meningkat dan pendapatan rata-rata warganya menurun sebagai akibat dari tingginya tingkat pengangguran di negara ini (Adriyanto, 2020).

Persaingan biasanya merupakan sumber dari pengangguran. Berdasarkan undang-undang Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional antara lain ditunjukkan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan peran pemerintah daerah dalam kegiatan ekonomi daerah dapat diungkapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 2 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah : . diatur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD, APBD merupakan dasar untuk mengelola keuangan daerah pada tahun anggaran”

Karena pendidikan biasanya menjadi kriteria untuk lowongan pekerjaan, orang dengan pendidikan yang layak juga akan lebih mudah mencari pekerjaan. Selain dituntut, orang yang berpendidikan tentunya akan lebih mengerti bagaimana harus bersikap karena sikap positif adalah yang paling utama. Masyarakat semakin sulit mendapatkan

pekerjaan, bahkan mereka yang sebelumnya bekerja di-PHK karena wabah Covid-19 menyebabkan pendapatan perusahaan menurun dan tidak mampu membayar para pekerja (Utami & Nurwati, 2022). Untuk bisa menata kembali perekonomian yang stabil dan mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara, maka diperlukan dukungan pemerintah dalam menghadapi persoalan ekonomi negara atau daerah. Melihat konteks yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi tindakan pemerintah dalam mengatasi ancaman pengangguran di Kota Batam pasca inflasi.

Dengan pertumbuhan inflasi tahun ini. Sebagai aturan bagi Pemerintah Kota Batam dan komponen terintegrasi lainnya di era MEA, Pemerintah Kota Batam telah menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui Inovasi dan Kompetensi. Dengan pemanfaatan jasa ini, pengembangan sumber daya manusia akan ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki berbagai keterampilan teknis dan manajerial yang memenuhi kriteria keterampilan kerja nasional. Peraturan Nomor 4 Tahun 2015 berjudul “Pembangunan Daerah Berbasis Daya Saing Melalui Inovasi dan Kompetensi” diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam. (Vol.2 No.2 (2023) *Journal Locus*).

KAJIAN TEORI

2.1. Teori Keynes

Menurut teori Keynes, inflasi dapat terjadi ketika sekelompok orang berusaha hidup di atas kemampuan ekonominya dengan membeli barang dan jasa secara berlebihan. Menurut teori hukum ekonomi, dengan semakin tinggi penawaran dan permintaan, akan membuat semakin tinggi harganya. kejadian biasa kenaikan umum harga barang dan jasa terus menerus. Inflasi adalah peristiwa yang menggambarkan keadaan dan status nilai

uang melemah dengan semua barang terus meningkat (Fahmi, 2012)

2.2 Teori Inflasi

Menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini akibat kenaikan harga komoditas dan BBM di masyarakat. Namun, ada berbagai jenis inflasi, masing-masing dengan efek dan penyebab yang berbeda. Mulai dari inflasi ringan kurang dari 10%, inflasi sedang 10% s/d 30%, Menurut Undang-Undang pasal 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai bank sentral dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Bank Indonesia (BI), konsep inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang dan jasa meningkat secara luas dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kondisi inflasi ini sebenarnya ditentukan oleh berbagai indikator inflasi yang ada. Sebagai contoh sederhana, terlalu banyak peredaran uang dalam masyarakat membuat nilai uang tidak berarti karena tersedia begitu banyak uang, yang meningkatkan kekuatan uang atas daya beli masyarakat.

Apa penyebab dan jenis inflasi? Kenaikan harga individu di Indonesia adalah situasi yang sangat normal. Selain itu, ada saat-saat tertentu ketika masyarakat cenderung melakukan aktivitas konsumsi dengan laju yang lebih tinggi dibandingkan waktu-waktu lainnya, seperti menjelang hari raya atau festival. Oleh karena itu, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar kenaikan harga dianggap sebagai fenomena inflasi. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai jenis inflasi yang harus kita ketahui. Inflasi adalah tingkat harga yang naik sebesar (Mankwi 2013: 155).

2.3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif Awalnya tidak lepas dari teori yang telah di kemukakan oleh imam prabowo.S.H. inflasi didefinisikan sebagai peningkatan jumlah

uang atau likuiditas dalam perekonomian. Definisi ini mengacu pada gejala umum yang disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar, di antaranya dikatakan menyebabkan harga naik. Dalam perkembangan lain, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus menerus seperti yang tertulis pada PMK REPUBLIK INDONESIA nomor 134/PMK.07 /2022 tentang belanja wajib pemerintah dalam penanganan dampak inflasi pada setiap tahunnya.

2.4 Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan dalam suatu penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2.5 Yuridis

Menurut kamus Hukum, bahwa kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi pendapat hukum (Sudarsono, 2007:606) dan bisa juga disimpulkan analisis yuridis Konsep dan arti kata analisis hukum adalah seperangkat perilaku di mana objek diamati, dijelaskan, atau diposisikan ulang dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk mencapai kesimpulan tentang objek yang melanggar hukum.

Investasi berdasarkan UU pasal 25 tahun 2007 dapat dilakukan dalam bentuk pembelian aset seperti tanah dan surat berharga dan berbagai jenis aset lainnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, jatuh tempo untuk tujuan menginvestasikan untuk mendapatkan penghasilan, maka perusahaan umumnya akan memilih untuk menginvestasikan dalam berbagai aset sehingga harus mudah diperdagangkan.

Dampak Inflasi berdasarkan peraturan presiden no.104 tahun 2021 Untuk mendukung program pengendalian dampak inflasi, daerah telah mengalokasikan belanja wajib perlindungan sosial (perlinsos) periode Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib tahun Sebagai bagian dari pengendalian dampak inflasi tahun 2022, belanja wajib dianggarkan sebesar 2% bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN Tahun 2022. Bantuan sosial wajib digunakan untuk memberikan bantuan sosial, antara lain bantuan kepada tukang ojek, usaha mikro, usaha kecil menengah dan nelayan. Kemudian untuk menciptakan lapangan kerja, serta mensubsidi sektor angkutan umum di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang penulis gunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang sudah dirancang untuk menyelidiki, sekaligus menggali, menginterpretasikan dan menjelaskan sifat-sifat atau ciri-ciri dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau dijelaskan dengan metode kuantitatif yaitu studi. Menurut studi dari Lexy J. Moleong (2005:6) mengungkapkan bahwa metode kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Ini termasuk interpretasi perilaku, persepsi, motivasi, perilaku, dan lain-lain. Secara keseluruhan, baik secara linguistik dan dalam konteks kondisi tertentu, menggunakan metode naturalistik yang berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang. Pendekatan kualitatif memiliki ciri alamiah (natural service) sebagai sumber

deskripsi langsung, proses lebih penting daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan melalui analisis induktif dan pemaknaannya penting. (Lexi Moleong, 2006:04).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Struktural inflasi menurut UU No.23 tahun 1999

Dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, Studi pendahuluan dalam penelitian dan pengembangan ini, seperti telah dipaparkan pada Bab III, dilakukan dengan analisis yuridis dan studi dokumen, pemaparan dari Inflasi akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat akibat kenaikan harga barang dan bahan bakar. Namun, ada berbagai jenis inflasi, masing-masing dengan efek dan penyebab yang berbeda. Dari inflasi ringan kurang dari 10%, inflasi sedang dari 10% hingga 30%, inflasi sangat kuat dari 30% hingga 100% hingga hiperinflasi, yaitu ketika tingkat inflasi melebihi 100%, nilai yang dihitung ini dapat terjadi selama periode tersebut.

Untuk memahami situasi ekonomi saat ini, penting untuk memahami berbagai jenis inflasi. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dengan mempertimbangkan jenis inflasi yang ada? untuk mengetahui kategori inflasi, apa saja penyebab dan jenis inflasi, indikator inflasi, hingga dampak inflasi terhadap ekonomi kerakyatan. Menurut Undang-Undang pasal 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai bank sentral dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Bank Indonesia (BI), konsep inflasi adalah suatu keadaan

dimana harga barang dan jasa meningkat secara luas dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan/atau pihak lain. pihak, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan undang-undang. Namun, independensi Bank Indonesia harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia semakin dipertegas, sebagaimana tertuang dalam undang-undang Pasal 58 bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis tentang efektivitas lembaga dalam melaksanakan undang-undang ini kepada Presiden dan DPR. Laporan yang disampaikan meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. (Mankwi 2013: 155). masalah struktural ekonomi negara berkembang lainnya adalah produksi produk pangan dalam negeri tidak fleksibel, dan di negara harganya cenderung naik lebih cepat dari harga barang lainnya. Dalam hal ini dapat mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari para pekerja sector industri di kota batam yang menyebabkan kenaikan biaya produksi dan kemudian malah akan menimbulkan akan terjadinya inflasi. (kebangsentralan seri inflasi, 2009:10-11). Makro ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi, makro ekonomi adalah disiplin ilmu dimana seseorang mempelajari kebijakan ekonomi dalam skala besar. Seperti: pendapatan nasional, output nasional, dan investasi nasional Singkatnya, makro ekonomi berfokus pada interaksi rekan dan pergerakan barang. Keadaan ekonomi makro dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Masalah terkait dengan

tingkat pendapatan. Dalam teoritis makro ekonomi kita dapat mempelajari dan mengembangkan hal-hal yang mempengaruhi inflasi salah satunya pengaruh dengan ketenagakerjaan yang ada di setiap kota. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Menurut kamus Hukum, bahwa kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi pendapat hukum (Sudarsono, 2007:606) dan bisa juga disimpulkan analisis yuridis Konsep dan arti kata analisis hukum adalah seperangkat perilaku di mana objek diamati, dijelaskan, atau diposisikan ulang dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk mencapai kesimpulan tentang objek yang melanggar hukum. Istilah ini sering digunakan dalam pekerjaan hukum untuk menggambarkan metode penelitian yang digunakan.

Pengendalian inflasi sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Inflasi yang stabil dan rendah diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan kebijakan makro. Namun demikian, sumber tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dikelola Bank Indonesia, tetapi juga dari sisi penawaran terkait produksi dan distribusi barang. Selain itu, tekanan inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait barang-barang dalam kelompok harga (kelompok barang yang ditetapkan pemerintah) seperti harga bahan bakar dan kuantitas komoditas energi. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan kebijakan makro diperlukan bauran kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dan pemerintah bekerja sama dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi (IPT). TPI di tingkat pusat dibentuk pada tahun 2005, kemudian dikonsolidasikan dengan

pembentukan TPI di tingkat daerah pada tahun 2008.

Kemitraan ini merupakan upaya pengendalian inflasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola ekspektasi inflasi, serta manajemen pasokan, termasuk manajemen pasokan, distribusi komoditas, konektivitas, rantai perdagangan, dan subsidi. Koordinasi penanggulangan inflasi diperkuat dengan dasar hukum berupa Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Timnas Pemberantasan Inflasi (TPIN). Tiga tim dibentuk dari TPIN, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Provinsi dan Daerah (TPID) dan TPID Kabupaten/Kota. Kelompok Pengendali Inflasi Daerah atau TPID merupakan kelompok yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah inflasi, khususnya di daerah.

Produk turunan dari landasan hukum ini kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Provinsi/Kota, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 148 Tahun 2017 tentang Fungsi dan Susunan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dan Keputusan Menteri Keuangan Mendagri No 500.05-8135 Tahun 2017.

4.2. Pengaruh Inflasi menurut PP No.105 tahun 2000

PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peran pemerintah terutama diperlukan untuk mengatur, mengendalikan serta juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan pengeluaran pemerintah. Pengendalian pemerintah dalam kegiatan perekonomian juga diperlukan agar kepentingan masyarakat tidak terdesak oleh kepentingan suatu golongan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi

nasional, antara lain ditunjukkan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara peran pemerintah daerah dalam kegiatan perekonomian di daerah dapat ditunjukkan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Dalam mengukur inflasi, suatu negara harus memiliki suatu formula perhitungan atau formula inflasi tertentu yang bisa digunakan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi dapat menimbulkan efek domino yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara jika lajunya tidak dikendalikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis strktural inflasi menurut UU No.23 tahun 1999

Mengetahui jenis inflasi, penyebab dan jenis inflasi, indikator inflasi, dampak inflasi terhadap perekonomian rakyat. Berdasarkan Pasal 3 UU Tahun 2004, Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai bank sentral dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Bank Indonesia (BI), konsep inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang dan jasa meningkat secara luas dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu.

Kondisi inflasi ini sebenarnya ditentukan oleh berbagai indikator inflasi yang ada. Ambil contoh sederhana, terlalu banyak peredaran uang di masyarakat membuat nilai uang menjadi tidak berarti

karena terlalu banyak uang, yang meningkatkan kekuatan uang atas daya beli masyarakat. Jenis inflasi yang berbeda memiliki efek yang berbeda, tetapi jelas bahwa penyebab dari jenis inflasi ini terkait dengan ketidakseimbangan aliran uang dan barang.

4.2. Analisis pengaruh inflasi menurut PP No.105 tahun 2000

Peran pemerintah terutama diperlukan untuk mengatur, mengendalikan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengatur pengeluaran pemerintah. Kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi juga diperlukan agar kepentingan umum tidak terdesak oleh kepentingan kelompok. Peran pemerintah dalam kinerja perekonomian nasional antara lain ditunjukkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

SIMPULAN

Penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan permasalahan yang disimpulkan dari pembahasan penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang signifikan pada pemerintahan dan para pengusaha untuk dapat memperbaiki ketimpangan ekonomi yang banyak terjadi karena adanya pengaruh inflasi yang mengalami peningkatan pengangguran pada suatu kota dan apabila itu di cermati dengan baik dapat dilihat dari UU no 23 tahun 1999 yang menjelaskan secara signifikan tentang inflasi. Peningkatan sumber daya kerja akan memberikan asumsi positif yang berarti semakin meningkatnya tenaga kerja pada suatu kota akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi dan mencegah kenaikan inflasi yang dengan lebih baik.

inflasi berpengaruh besar terhadap pengangguran dan sumber tenaga kerja secara yuridis, hal tersebut sudah di jelaskan dalam kebijakan pemerintah tentang pengembangan sumber daya manusia terutama diatur dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dan pengembangan tersebut juga didukung dari

pelaksanaan pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penulis dapat mengambil saran yang *pertama*, seharusnya inflasi juga harus diimbangi dengan peningkatan dengan kesempatan kerja yang lebih banyak, tentunya dengan kegiatan investasi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja secara tidak langsung. Seperti yang tertulis dalam peraturan UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana kesempatan kerja juga sebaiknya diciptakan pada semua daerah di kotamadya dan tidak mementingkan daerah tertentu. *Kedua*, Para pencari kerja juga sebaiknya harus dibekali oleh kemampuan dan keterampilan yang baik seperti dengan cara menyelenggarakan kursus-kursus tertentu yang mendukung, membantu, dan mendorong usaha para wiraswasta agar dapat menyerap tenaga kerja yang telah terbekali keterampilan yang dibutuhkan. *Ketiga*, Seperti yang tertulis pada UU No.105 Tahun 2000 yang membahas tentang pengolaan dan pertanggung jawaban Penduduk miskin dan pengangguran yang ada pada suatu kota hendaknya harus tetap dibantu sehingga diharapkan daerah yang tertinggal akan mampu mengejar perekonomian daerah yang sudah maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, F., & Aravik, H. 2018. Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate terhadap Inflasi. *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 95-108.
- Sugiyono. 2015. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung :Alfabeta
- Erika Feronika Br Simanungkalit, (2020), pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia <https://media.neliti.com/media/publication/s/332928-pengaruh-inflasi-terhadap-pertumbuhan-ek-ead63671.pdf> Website Badan Pusat Statistik (bps.go.id). Website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pen-pengena/Contents/Default.aspx>).
- La Ahmad Hidayat, (2017), Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah serta Jumlah Uang Beredar terhadap Return Saham/<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/2121/0>.
- Yulia Dwi Kartika, (2021), Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2013-2021. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/Pengaruh+Inflasi+terhadap+Pertumbuhan+Ekonomi+di+Indonesia+Periode+2013-2021.pdf>.
- Ofoegbu, G. N., Akwu, D. O., & O, O. (2016). Empirical Analysis of Effect of Tax Revenue on Economic Development of Nigeria. *International Journal of Asian Social Science*, 6(10), 604–613. <https://doi.org/10.18488/journal.1/2016.6.10/1.10.604.613>.
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management, & Accounting*, 1(1), 104–120.
- Ratna Pratiwi, Yeni. (2022). Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19. Diakses pada 18 November 2022 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/bacaartikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-SetelaKontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- Desrini ningsih, (2018), Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/777-Research%20Results-3108-1-1020180906.pdf>.
- melia. (2012). Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Volume 1, No.5, April 2012. Wulandari, Fransiska Hastin. 2016. Pengaruh Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Provinsi Indonesia Tahun 2008-2012. Tesis. Universitas Adma Jaya Yogyakarta.